

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN JENEPONTO

2016



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016

Katalog BPS : 4102002.7304
No. Publikasi : 73045.1718
Ukuran Buku : 29 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : iii + 33 halaman

Naskah/Grafik:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Kebutuhan konsumen data akan data statistik semakin kompleks, khususnya data sosial. Untuk memenuhi data tersebut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto telah menerbitkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jeneponto 2016. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan rakyat dan indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jeneponto.

Data yang digunakan untuk menganalisis dua hal tersebut adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2016, di samping data sekunder (tahun data 2016) yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan publikasi ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi IPM selanjutnya. Akhir kata, semoga publikasi ini bermanfaat.

Jeneponto, Oktober 2017

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Jeneponto,**



H. Mukrabin, S.E., M.M.
NIP: 19630626 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	2
1.3. Sistematika Penulisan	2
BAB II. METODOLOGI	4
2.1. Konsep dan Definisi: Indeks Pembangunan Manusia	5
2.1.1. Angka Harapan Hidup – AHH	6
2.1.2. Harapan Lama Sekolah – HLS	7
2.1.3. Rata-Rata Lama Sekolah – RLS	8
2.1.4. <i>Purchasing Power Parity</i> – PPP	9
2.2. Sumber Data	9
BAB III. GAMBARAN UMUM	10
3.1. Letak Geografis	10
3.2. Kependudukan	10
3.3. Perekonomian	11
3.4. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	13
3.5. Trend Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	13
BAB IV. POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA	14
4.1. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia	14
4.1.1. Indeks Kesehatan	14
4.1.2. Indeks Pendidikan	15
4.1.3. Indeks Pengeluaran	15
4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16

Halaman

BAB V. KESEHATAN	17
5.1. Angka Harapan Hidup	17
5.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan	18
5.3. Status Kesehatan Masyarakat	18
5.4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat	19
BAB VI. PENDIDIKAN	20
6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan	20
6.2. Tingkat Pendidikan	21
6.2.1. Angka Melek Huruf	21
6.2.2. Rata-rata Lama Sekolah	22
6.2.3. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	22
6.3. Tingkat Partisipasi Sekolah	23
BAB VII. KETENAGAKERJAAN	24
7.1. Angkatan Kerja	24
7.1.1. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja	25
7.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	25
7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	26
BAB VIII. PENUTUP	27
8.1. Kesimpulan	27
8.2. Implikasi Kebijakan	27
LAMPIRAN TABEL	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Perhatian global terfokus pada isu-isu pertumbuhan ekonomi dan perlunya dilaksanakan reformasi ekonomi, di samping itu juga perlunya diperhatikan dimensi manusia dalam pembangunan. Hal terakhir muncul sebagai salah satu isu sehubungan dengan tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada manusia dan hak-hak azasinya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pemikiran tentang pembangunan (paradigma) di dunia. Pembangunan hanya berorientasi pada peningkatan produksi (*production centered development*) dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih esensial yaitu *human security*. Dalam kerangka pemikiran ini manusia tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, tetapi hanya sebagai faktor produksi. Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

Pada dekade 70-an paradigma pembangunan bergeser dengan lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*) pada dekade 80-an, dan memasuki tahun 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered development*). Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme – UNDP*).

Berbagai pergeseran dalam kebijaksanaan pembangunan menyebabkan pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada harus disesuaikan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep “*basic*

need development". Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir, dan tingkat melek huruf.

Kemudian dengan muncul dan berkembangnya paradigma baru pembangunan manusia, sejak tahun 1990 *United Nations Development Program (UNDP)* menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembangunan di Kabupaten Jeneponto untuk melihat sejauh mana kinerja pembangunan di wilayah ini.

1.2. Tujuan Penulisan

Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 disusun dalam kerangka untuk menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan, dengan bercirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga diharapkan daerah mempunyai indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian pembangunan, terutama yang terkait erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Di samping itu, IPM berfungsi sebagai input dalam penyusunan Pola Dasar (Poldas) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada), agar jiwa pembangunan pada era reformasi ini terimplementasi dalam dokumen perencanaan dan untuk penajaman prioritas pembangunan. Sebagai data strategis, publikasi IPM ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang kinerja pembangunan di Kabupaten Jeneponto.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut:

- Bab Satu menguraikan tentang latar belakang, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

- Bab Dua membahas tentang metodologi, yang meliputi konsep dan definisi, metode yang digunakan, penjelasan komponen-komponen dan cara penghitungan indeks masing-masing komponen, serta sumber data yang digunakan.
- Bab Tiga membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Jeneponto yang terdiri atas letak geografis, kependudukan, perekonomian, potensi dan pemanfaatan sumber daya alam, serta trend alokasi APBD.
- Bab Empat membahas tentang posisi pembangunan manusia yang meliputi Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pengeluaran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Bab Lima membahas masalah kesehatan yang meliputi angka harapan hidup, pelayanan kesehatan, status kesehatan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat.
- Bab Enam membahas mengenai pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana pendidikan, tingkat pendidikan, serta tingkat partisipasi sekolah.
- Bab Tujuh membahas ketenagakerjaan yang meliputi angkatan kerja dan pengangguran.
- Bab Delapan adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran implikasi kebijakan.

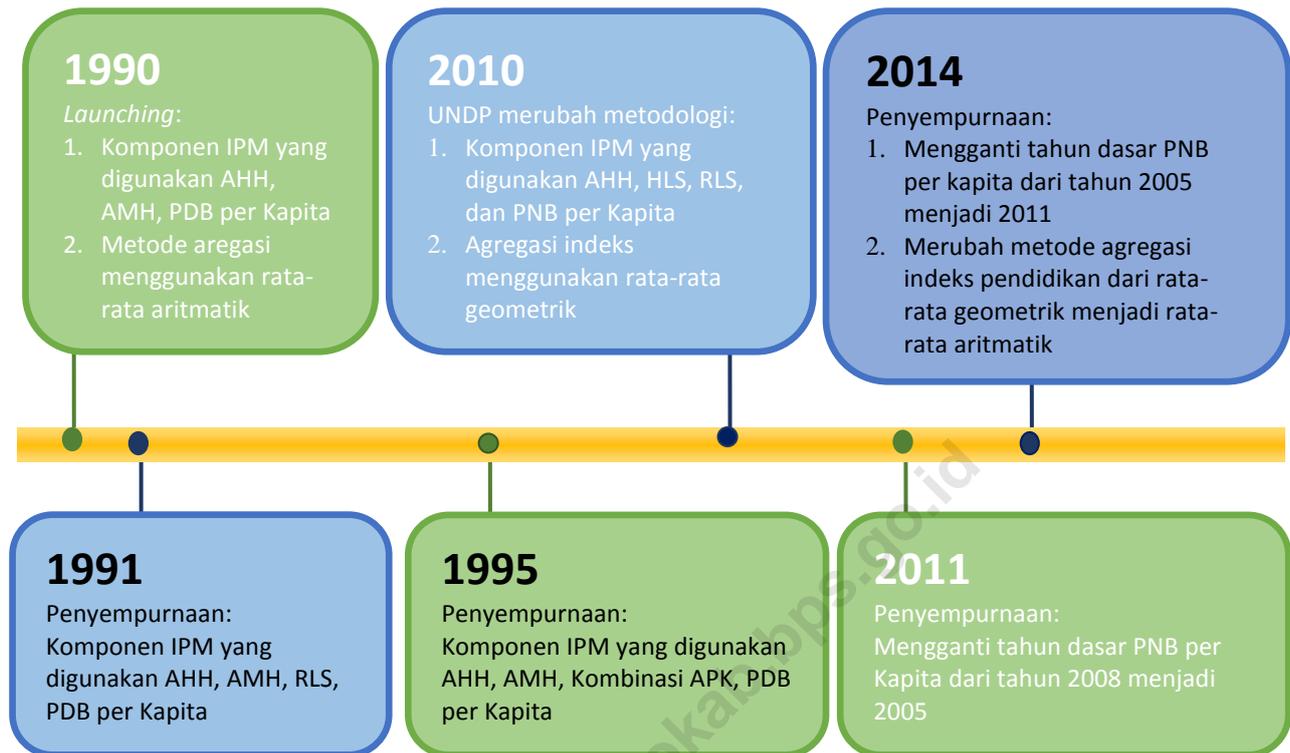
BAB II

METODOLOGI

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu dimulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. Maka, dalam laporan ini disajikan konsep dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan buku ini.

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru dan pada tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metode Baru). Penyempurnaan metode baru dilakukan karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM, seperti:

- Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah sehingga menggunakan PNB (Pendapatan Nasional Bruto) per kapita.
- Selain itu, IPM metode lama menggunakan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.



Catatan:

AHH : Angka Harapan Hidup saat Lahir

AMH : Angka Melek Huruf

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

PDB : Produk Domestik Bruto

APK : Angka Partisipasi Kasar

HLS : Harapan Lama Sekolah

PNB : Produk Nasional Bruto

2.1. Konsep dan Definisi: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik yang terdiri dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks pengeluaran, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut berkisar antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(i) \text{ min}}{X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min}}$$

Dimana $X(i)$: Indikator ke-i (i=1,2,3)
 $X(i) \text{ maks}$: Nilai maksimum $X(i)$
 $X(i) \text{ min}$: Nilai minimum $X(i)$

Tabel 2.1.
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
yang Digunakan dalam Penghitungan

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2.1.1. Angka Harapan Hidup – AHH

Seperti yang telah disebutkan dalam BPS-UNDP (1996: 8) bahwa sebenarnya agak “berlebihan” mengatakan variabel e_0 dapat mencerminkan “lama hidup”

sekaligus “hidup sehat”, mengingat angka morbiditas tampaknya lebih valid dalam mengukur “hidup sehat”. Meskipun demikian, karena keterbatasan data dan hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan.

AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Penggunaan AHH didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan resultante dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

2.1.2. Harapan Lama Sekolah - HLS

Terhadap perubahan komponen penghitungan di mana pendekatan sebelumnya menggunakan indeks angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas, diubah menjadi indeks harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Metodologi penghitungan HLS oleh UNDP pada tahun 2010 adalah:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t	Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
E_i^t	Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
P_i^t	Jumlah penduduk usia i pada tahun t
i	Usia ($a, a+1, \dots, n$)
FK	Faktor koreksi pesantren

2.1.3. Rata-rata Lama Sekolah - RLS

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^{10} f_i \times LSi}{\sum_{i=1}^{10} f_i}$$

Di mana:

- MYS** : rata-rata lama sekolah (dalam tahun)
 f_i : frekuensi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan i
 S_i : skor masing-masing jenjang pendidikan i
 LS_i : 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)
 LS_i : S_i (bila tamat)
 LS_i : $S_i + \text{kelas yang diduduki} - 1$ (bila masih bersekolah dan pernah tamat)
 LS_i : kelas yang diduduki $- 1$ (bila jenjang yang diduduki SD/SR/MI/Sederajat)
 I : jenjang pendidikan (1,2,3, ...,10)

Tabel 2.2.
Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah

Jenjang Pendidikan	Skor
(1)	(2)
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2	18
S3	21

2.1.4. *Purchasing Power Parity* – PPP

Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai *Purchasing Power Parity* (PPP) yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil susenas modul konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Selain itu, ada penambahan jumlah komoditas yang dikonsumsi semula 27 komoditas menjadi 96 komoditas dengan perincian 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan menggunakan Metode Rao dengan penghitungan sebagai berikut:

$$PPP_i = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ij} : harga komoditas i di Kab/Kota j

m : jumlah komoditas

2.2. Sumber Data

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah yang disajikan dalam tulisan ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selain dari data survei tersebut, juga menyajikan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Susenas dengan penyajian sampai pada level kabupaten/kota dimulai sejak tahun 1993 (Susenas 1993). Susenas merupakan survei rumahtangga dengan lingkup nasional dan dilakukan secara sampel. Keterangan (data) yang dikumpulkan melalui Susenas antara lain menyangkut bidang demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengeluaran rumahtangga. Keterangan tersebut umumnya dikumpulkan setiap tahun, yang biasa disebut data pokok (kor) Susenas. Sedangkan data yang lebih rinci dikumpulkan setiap tiga tahun sekali dan disebut data modul (sasaran) Susenas. Data modul Susenas dikelompokkan sebagai berikut: (i) Konsumsi dan pendapatan; (ii) Pendidikan, kesehatan, dan perumahan; dan (iii) Sosial budaya, kriminalitas, dan wisata nusantara, tetapi cakupan modul ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Dalam penyajian laporan ini, sebagai indikator atau data basis adalah data yang dihasilkan dari kor Susenas 2015 atau 2016 terutama yang berkaitan dengan indikator pendukung, seperti indikator kependudukan, indikator bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Letak Geografis

Luas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah sekitar 749,79 km². Daerah ini terdiri dari 11 kecamatan dengan 82 Desa dan 31 Kelurahan. Secara geografis daerah ini terdiri dari 25% (28 desa/kelurahan) merupakan daerah pesisir, 8% (9 desa/kelurahan) lembah, 27% (30 desa/kelurahan) lereng/bukit dan 40% (45 desa) adalah dataran.

Kabupaten Jeneponto terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi antara 5°23'12"-5°42'1,2" Lintang Selatan dan 119°29'12"-119°56'44,9" Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, sebelah Selatan berbatasan Laut Flores, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

3.2. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 adalah sekitar 357.807 jiwa yang terdiri dari 184.913 perempuan dan 172.894 laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 sekitar 0,94 yang berarti terdapat sekitar 94 orang laki-laki di antara 100 perempuan. Lebih banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan laki-laki ini diduga salah satu penyebabnya karena penduduk laki-laki banyak yang bekerja untuk mencari nafkah dan menetap di luar daerah, seperti Kota Makassar dan sekitarnya, namun tidak mengesampingkan bahwa jumlah kelahiran lebih dominan jenis kelamin perempuan.

Hasil Sensus Penduduk (SP), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu 1990-2000 adalah 0,95 persen per tahun. Kemudian pada kurun waktu 2000-2010 turun menjadi 0,93 persen per tahun. Sementara dalam kurun waktu 2010-2015 secara rata-rata mengalami pertumbuhan sekitar 0,67 persen per tahunnya. Pertumbuhan penduduk di daerah ini masih relatif kecil, namun demikian perlu selalu dimonitor agar tetap terkendali karena oleh banyak pihak pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Dengan kata lain apabila pertumbuhan

penduduk lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah.

Pertumbuhan penduduk yang positif pada akhirnya akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Indikator ini dapat ditunjukkan dari kepadatan penduduk Kabupaten Jeneponto yaitu 477 jiwa/km² pada tahun 2016, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya sekitar 474 jiwa/km². Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai macam fasilitas. Jika hal tersebut diikuti dengan peningkatan potensi penduduk, terutama dari segi ekonomi, maka peningkatan kepadatan penduduk sedikit akan mengurangi masalah yang dirisaukan.

Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2016 adalah sekitar 101.603 orang, penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 234.042 orang yang disebut dengan usia produktif, dan mereka yang berusia lanjut (65 tahun ke atas) sekitar 22.162 orang. Setelah dihitung maka angka beban ketergantungan adalah sebesar 52,88 atau secara hipotesis bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 menanggung beban ekonomi sekitar 53 orang usia tidak produktif.

3.3. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang diperoleh pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga. Perubahan yang diukur adalah perubahan produksi sehingga menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi. Sedangkan harga konstan yang dimaksud adalah harga konstan tahun 2010.

Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2016.

Tabel 3.1.
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto
Tahun 2012-2016

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (persen)	PDRB ADH Konstan (juta Rp)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	4.720.379,03	15,18	4.174.461,38	7,55
2013	5.269.409,67	11,63	4.422.900,77	6,64
2014	6.155.880,02	16,82	4.773.643,60	7,93
2015	7.000.784,98	13,73	5.085.250,22	6,53
2016	7.877.172,22	12,52	5.513.690,76	8,43
Rata-rata	6.204.725,18	13,98	4.793.989,35	7,42

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto

Bila diperhatikan selama periode 2012-2016, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Jeneponto menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7,42 persen. Selanjutnya, struktur ekonomi Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak mengalami pergeseran yang berarti. Pada tahun 2016, peranan sektor pertanian terhadap perekonomian daerah ini masih sangat besar yakni sekitar 51,69 persen. Tingginya peranan ini ditopang oleh sub-sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian sebesar 41,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian sebagian besar penduduk Kabupaten Jeneponto masih mengandalkan sub-sektor tersebut.

Sektor lain yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sekitar 11,67 persen, sektor konstruksi sebesar 9,18 persen, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,83 persen, sedangkan sektor lainnya masih menunjukkan kontribusi yang relatif kecil di bawah lima persen.

3.4. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kondisi geografis Kabupaten Jeneponto pada 113 desa/kelurahan merupakan wilayah pesisir, lembah, berbukit, dan dataran. Kondisi tersebut menggambarkan suatu wilayah yang menyimpan sumber daya alam yang lengkap. Walaupun bukan daerah lumbung beras, tetapi produksi padi sawah di daerah ini menghasilkan rata-rata produksi mencapai 5,80 ton/Ha per tahun, dengan produksi padi pada tahun 2016 sekitar 126.909 ton. Selain itu, daerah ini juga merupakan daerah potensial penghasil tanaman palawija khususnya jagung dengan produksi sebesar 284.859 ton pada tahun 2016.

Daerah pesisir yang meliputi 28 desa atau sekitar 25 persen dari total desa di Kabupaten Jeneponto merupakan daerah potensi pengembangan budidaya air payau maupun perikanan laut. Sebagai mata pencaharian penduduk utama di daerah pesisir, sebanyak 2.541 rumah tangga bekerja sebagai nelayan, 7.105 rumah tangga berusaha pada budidaya rumput laut, 1.247 budidaya tambak, dan 133 rumah tangga pada budidaya kolam air tawar.

Produksi perikanan laut mengalami peningkatan produksi pada tahun 2016 menjadi 16.470 ton, sedangkan produksi rumput laut naik menjadi 17.044,94 ton. Produksi perikanan darat dengan jenis komoditi udang, ikan bandeng dan budidaya kolam memperlihatkan produksi masing-masing sebesar 561,48 ton, 2.392,91 ton, dan 61,25 ton. Ketiga jenis hasil komoditi daerah pesisir di Kabupaten Jeneponto tersebut berpotensi untuk lebih dikembangkan di masa yang akan datang.

3.5. Trend Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan pada tahun 2016, di mana realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1.261.885.035,00, meningkat 20,79 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 1.245.329.180,00 atau sekitar 98,69 persen dari pendapatan daerah yang terserap. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel Lampiran 2.

BAB IV

POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA

Dalam era reformasi saat ini, otonomi daerah telah diterapkan secara menyeluruh sejak tahun 2002, sehingga roda pembangunan diharapkan lebih dekat ke masyarakat, lebih cepat pelayanannya, lebih murah biayanya, dan lebih sesuai dengan kebutuhan riilnya. Untuk itu, tingkat keberhasilan pembangunan (kinerja) suatu daerah perlu diukur. Dalam pembahasan ini, kinerja pembangunan yang dimaksud adalah kinerja pembangunan manusia yang disajikan dalam satu indikator komposit (angka tunggal) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Komponen-komponen tersebut adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

4.1. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

4.1.1. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan diperoleh dari Angka Harapan Hidup (AHH), diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia di bidang kesehatan. Pada tahun 2015 indeks kesehatan Kabupaten Jeneponto tercatat sekitar 69,98. Kemudian indeks ini bergeser naik 0,13 poin menjadi 70,11 di tahun 2016. Angka ini menunjukkan belum adanya peningkatan yang berarti. Indeks kesehatan Kabupaten Jeneponto menduduki peringkat terakhir dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Ke depannya, tentu diperlukan kerja keras terutama bagi pihak-pihak terkait untuk semakin mengupayakan perbaikan di segala bidang kesehatan terutama perbaikan sarana dan prasarana kesehatan. Selain itu, peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga perlu ditingkatkan, sehingga hal ini dapat mendongkrak Angka Harapan Hidup masyarakat Jeneponto.

4.1.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2015 tercatat sekitar 51,31, kemudian pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan 0,22 poin menjadi sekitar 51,53.

Walaupun masih merupakan angka terendah di Sulawesi Selatan, namun angka ini menunjukkan perubahan yang positif dari tahun ke tahun. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa telah terjadi perubahan pembangunan manusia ke arah yang lebih baik dari sisi pendidikan masyarakat, hanya saja belum seperti yang kita harapkan bersama. Dengan tekad dan keinginan bersama baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat, maka kita harus yakin bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Jeneponto akan berkembang seperti apa yang kita harapkan, tentunya dengan diiringi oleh peningkatan mutu pendidikan serta fasilitas pendidikan yang memadai.

4.1.3. Indeks Pengeluaran

Indeks pengeluaran diperoleh dari komponen *Purchasing Power Parity* (PPP) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam laporan ini digunakan PDRB riil perkapita yang disesuaikan. Penggunaan PDRB riil perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum sampai estimasi kabupaten/kota. PPP dihasilkan dari PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan dengan formula Atkinson (*Adjusted Real GRDP Per Capita*), sehingga tampak variasinya sangat kecil. Hampir semua kabupaten mengalami kenaikan PPP. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kabupaten Jeneponto dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak.

Daya beli penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2015 sekitar 8.489.000 rupiah per tahun dengan indeks pengeluaran sebesar 65,13. Kemudian pada tahun 2016 terjadi peningkatan daya beli masyarakat menjadi sekitar 8.559.000 rupiah per tahun dengan indeks pengeluaran sebesar 65,38. Walau kemampuan daya beli masyarakat Jeneponto pada penghitungan ini dinilai cukup bersaing dengan kabupaten lain, namun perlu diingat IPM dihitung tidak hanya menggunakan satu indeks, tetapi gabungan dari tiga indeks.

4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 adalah 61,81. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 61,61. Walaupun berdasarkan peringkatnya menduduki urutan terakhir dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, namun seiring dengan meningkatnya komponen pembentuk IPM, maka angka IPM ini tetap menunjukkan adanya pertumbuhan meskipun relatif kecil. Peningkatan ini merupakan suatu kemajuan bagi Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan kriteria UNDP, nilai IPM kurang dari 51 (< 51) digolongkan sebagai IPM rendah, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi. Maka dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kabupaten Jeneponto tergolong dalam kategori menengah.

BAB V

KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan memberikan penyuluhan agar masyarakat membiasakan diri untuk hidup sehat dan juga menyediakan beberapa fasilitas kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil.

5.1. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH atau e_0 didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH penduduk Kabupaten Jeneponto pada 2016 meningkat 0,08 poin dari tahun sebelumnya dari 65,49 menjadi 65,57. Dengan kata lain, rata-rata lama hidup penduduk Jeneponto pada tahun 2016 hanya mencapai umur 65 tahun. Walaupun peningkatannya cukup kecil dari tahun sebelumnya, namun mengindikasikan bahwa meningkatnya pula kelangsungan hidup dari tahun sebelumnya. Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Khusus untuk variabel eksogen dapat dibuat daftar yang cukup panjang di antaranya mencakup input makanan, upaya kesehatan, dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (*time lag*) tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

Sementara itu, masih terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap AHH. Secara umum diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat.

5.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Fasilitas yang tersedia tanpa didukung dengan tenaga yang profesional di bidangnya tentunya akan kurang bermakna, begitu juga sebaliknya tenaga yang tersedia tanpa fasilitas yang memadai akan mendapatkan hasil yang kurang optimal.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, di samping telah tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Dg Pasewang yang berada di ibukota Kabupaten Jeneponto, pada tahun 2016 terdapat 19 buah Puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan. Dengan demikian rasio penduduk per puskesmas sekitar 18.832 orang.

Untuk menjangkau semua penduduk dalam wilayah kerja masing-masing rasanya agak sulit dilakukan oleh Puskesmas, apalagi mengingat beberapa daerah mempunyai kondisi geografis yang cukup sulit. Oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lain yang setingkat di bawahnya yang disebut Puskesmas Pembantu (Pustu). Jumlah Pustu di Kabupaten Jeneponto ada sebanyak 55 buah di tahun 2016. Keberadaan Pustu ini sangat berarti sekali dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat, terutama yang berada pada daerah perdesaan.

Tenaga kesehatan yang selanjutnya disebut tenaga medis dan paramedis di Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan menunjukkan perubahan yang signifikan (634 orang di tahun 2015 menjadi 641 orang di tahun 2016). Perinciannya, tenaga medis dokter pada tahun 2016 berjumlah 75 orang (dokter umum, gigi, dan ahli), 386 perawat dan bidan, 31 orang tenaga farmasi, 24 orang ahli gizi, 28 orang tenaga sanitasi, 43 orang tenaga kesehatan masyarakat, dan lainnya. Semua tenaga kesehatan tersebut bekerja pada sarana pelayanan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Jeneponto.

5.3. Status Kesehatan Masyarakat

Data Susenas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Jeneponto sekitar 39,92 persen pada tahun 2015, kemudian menurun menjadi 26,99 persen dari total penduduk di tahun 2016. Sementara itu, 53,33 persen penduduk merasa terganggu kegiatannya akibat keluhan

kesehatan tersebut. Banyaknya penduduk yang mengalami gangguan kesehatan diduga sebagai akibat perubahan cuaca yang semakin tidak menentu. Apabila dilihat dari jenis kelamin, maka persentase perempuan yang mengeluh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Tabel 5.1.
Persentase Penduduk yang Mengeluh Sakit Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 dan 2016

Jenis Kelamin	2015		2016	
	Yang Mengeluh (%)	Penduduk	Yang Mengeluh (%)	Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	34,62	171.882	24,20	172.894
Perempuan	35,19	183.717	29,59	184.913
Total	34,92	355.599	26,99	357.807

Sumber: Susenas

5.4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia. Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan diarahkan melalui 3 kegiatan: (1) Kepemimpinan, yaitu melakukan intervensi kepemimpinan yang berwawasan kesehatan untuk semua, (2) Pengorganisasian, yaitu melakukan intervensi di bidang kesehatan pada setiap kelompok masyarakat sehingga muncul Usaha Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM), (3) Pendanaan, yaitu mengembangkan sumber dana yang ada untuk membiayai beberapa kegiatan di bidang kesehatan.

Peningkatan peran serta masyarakat secara kasar dapat dilihat melalui keberadaan jenis UKBM, misalnya Posyandu, Polindes, POD (Pos Obat Desa), BKM (Bina Keluarga Balita), dan lain-lain. Di Kabupaten Jeneponto telah terjadi perubahan terhadap kualitas peran serta masyarakat selama dua tahun terakhir. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari jumlah Posyandu, Poskesdes, dan Polindes. Keberadaan UKBM di Jeneponto pada tahun 2016 mencakup 52 Poskesdes, 3 Polindes, dan 484 Posyandu.

BAB VI

PENDIDIKAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia. Berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk menciptakan insan-insan Indonesia yang berkualitas masa kini dan masa yang akan datang.

6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap kemajuan dunia pendidikan. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelangkaan jumlah guru pada daerah-daerah terpencil. Isu yang masih sering terdengar adalah banyaknya guru yang enggan ditempatkan pada daerah terpencil tersebut, sehingga mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah-daerah perkotaan.

Pada tahun 2015 jumlah murid SD sederajat sebanyak 50.802 orang dan guru sebanyak 2.464 orang, dengan rasio murid-guru sekitar 21 yang artinya setiap guru SD mengajar sekitar 21 orang murid. Sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah murid 48.194 orang dan guru sebanyak 3.203 orang, rasio murid-guru menjadi 15 yang berarti setiap guru SD mengajar sekitar 15 orang murid. Hal ini menunjukkan terjadi pengurangan beban mengajar guru akibat adanya penambahan tenaga pengajar SD di Kabupaten Jenepono.

Pada tingkat SLTP, rasio murid-guru menunjukkan peningkatan dari 11 (2015) menjadi 12 (2016). Demikian juga pada tingkat SLTA, rasio murid-guru mengalami peningkatan dari 8 (2015) menjadi 10 (2016). Untuk tingkat SLTP dan SLTA, terjadi penurunan jumlah guru sehingga rasio jumlah murid-guru semakin meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa banyaknya murid yang menjadi tanggung jawab untuk setiap guru semakin bertambah.

Untuk melihat rata-rata banyaknya murid yang bersekolah dalam setiap jenjang pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan jumlah murid terhadap sekolah. Salah satu kegunaannya adalah untuk melihat apakah sudah waktunya pemerintah atau pihak swasta membangun sekolah baru pada suatu tempat. Rasio murid-sekolah SD di Kabupaten Jenepono sekitar 153 siswa per sekolah pada tahun 2015, menurun

menjadi 148 siswa per sekolah pada tahun 2016. Hal ini berarti beban tiap sekolah untuk menampung murid semakin menurun. Sementara itu, rasio murid-sekolah SLTP juga mengalami penurunan dari 172 siswa per sekolah pada tahun 2015 menjadi 171 siswa per sekolah pada tahun 2016. Sedangkan untuk rasio murid-sekolah SLTA meningkat dari 204 siswa per sekolah pada tahun 2015 menjadi 241 siswa per sekolah pada tahun 2016.

Semakin rendah nilai rasio murid dan jumlah sekolah mengindikasikan tingkat kepadatan untuk tiap sekolah semakin berkurang, seiring dengan makin banyaknya penambahan sekolah di Jeneponto. Sebaliknya, semakin tinggi nilai rasio murid dan jumlah sekolah menandakan bahwa tingkat kepadatan sekolah semakin bertambah akibat peningkatan jumlah siswa yang bersekolah namun tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada.

6.2. Tingkat Pendidikan

6.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Jeneponto merupakan peringkat ketiga terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015 penduduk yang bisa baca tulis hanya sekitar 83,50 persen dari total penduduk. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 85,19 persen.

Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, rendahnya AMH Kabupaten Jeneponto dibandingkan daerah lainnya

menunjukkan masih minimnya kemampuan membaca dan menulis, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menunjukkan angka 8,97 persen untuk penduduk yang sama sekali belum pernah sekolah dari total jumlah penduduk di Kabupaten Jeneponto, sehingga makin memperjelas bahwa masih

Angka Melek Huruf di Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2016



diperlukan kerja lebih keras dalam rangka pengentasan buta huruf, agar dapat menunjang peningkatan pembangunan manusia yang ideal dan diharapkan.

6.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2015 sebesar 5,64 dan pada tahun 2016 sebesar 5,65. Jadi, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jeneponto hanya mengalami perubahan yang kecil sekali. Dengan melihat angka tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk rata-rata hanya sampai kelas 5 sampai 6 SD. Apabila tidak ada intervensi dari pemerintah atau perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan maka akan sulit untuk sejajar dengan daerah-daerah tingkat dua lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

6.2.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tabel 6.1.
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan di Kabupaten Jeneponto
Tahun 2015 dan 2016 (%)

Tingkat Pendidikan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
SLTP	15,35	12,52
SMU + SMK	13,72	16,66
Perguruan Tinggi	4,48	4,63

Sumber: Susenas 2015-2016

tercatat sebesar 15,35 persen. Untuk tingkat pendidikan SMU sederajat mengalami kenaikan dari 13,72 persen di tahun 2015 menjadi 16,66 persen di tahun 2016. Begitu pula untuk tingkat perguruan tinggi mengalami peningkatan menjadi 4,63 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya melanjutkan pendidikan semakin tinggi. Diharapkan pada tahun berikutnya terjadi peningkatan kembali, sehingga dapat mendongkrak angka IPM Kabupaten Jeneponto di masa yang akan datang.

Potensi sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah antara lain dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk. Berdasarkan data hasil Susenas, penduduk Kabupaten Jeneponto umur 15 tahun ke atas yang berpendidikan SLTP sekitar 12,52 persen, mengalami penurunan dari tahun 2015 yang

6.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dengan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk usia tersebut.

Tabel 6.2.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut
Usia Sekolah (7-18 Tahun) di
Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 dan
2016 (%)

Penduduk Usia Sekolah	2015	2016
(1)	(2)	(3)
7 – 12	90,60	99,25
13 – 15	67,54	89,06
16 – 18	44,00	55,44

Sumber: Susenas 2015-2016

untuk usia 16-18 tahun juga meningkat dari 44 persen di tahun 2015 menjadi 55,44 persen di tahun 2016. Di sini terlihat bahwa upaya peningkatan partisipasi sekolah baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat semakin tinggi.

APS Kabupaten Jeneponto masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan rata-rata APS secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015 APS rata-rata Kabupaten Jeneponto pada usia 7-12 tahun mencapai 90,60 persen dan untuk tahun 2016 terjadi kenaikan menjadi 99,25 persen. Begitupun untuk usia 13-15 tahun, di mana pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sekitar 89,06 persen. APS

BAB VII KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja setiap tahun.

Bab ini menguraikan berbagai data mengenai keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Jeneponto, yaitu perkembangan angkatan kerja, tingkat pendidikan angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, lapangan pekerjaan, dan tingkat pengangguran. Data penghitungan ketenagakerjaan pada bab ini menggunakan data penduduk usia 15 tahun ke atas.

7.1. Angkatan Kerja

Setiap pembicaraan mengenai angkatan kerja pasti menyangkut penduduk, karena angkatan kerja merupakan bagian daripada penduduk dan tenaga kerja yang terus menerus bertambah sejalan dengan perkembangan penduduk. Yang masuk dalam angkatan kerja adalah semua penduduk usia 15 tahun ke atas. Jumlah angkatan

Tabel 7.1.
Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk
Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	155.035	353.287	43,88
2015	154.370	355.599	43,41

Sumber: Sakernas

penduduk yang mengalami kenaikan sekitar 0,65 persen pada periode yang sama. Demikian juga dengan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan dari 43,88 persen pada tahun 2014 menjadi 43,41 persen pada tahun 2015.

kerja Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu 2014-2015 terjadi penurunan sekitar 0,43 persen menjadi berjumlah 154.370 orang. Jumlah ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan

7.1.1. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja

Tenaga kerja yang berkualitas antara lain dapat diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Kabupaten Jeneponto tingkat pendidikan angkatan kerja tergolong masih rendah. Hal ini tampak dari proporsi angkatan kerja yang berpendidikan rendah (hanya tamat SD atau tidak pernah sekolah) lebih besar dari

Tabel 7.2.
Persentase Angkatan Kerja Menurut
Tingkat Pendidikan di Kabupaten
Jeneponto Tahun 2014 dan 2015

Tingkat pendidikan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Rendah	61,49	57,84
Menengah	28,53	32,99
Tinggi	9,98	9,17

Sumber: Sakernas

Catatan :Rendah = Tamat SD ke bawah
Menengah = SLTP/SLTA Sederajat
Tinggi = Akademi/Universitas

menjadi 9,17 persen (2015). Meningkatnya mutu pendidikan angkatan kerja untuk level rendah diharapkan dapat memperbaiki taraf hidupnya melalui pendidikan. Perbaikan mutu ini diharapkan perlu untuk dikembangkan agar taraf hidup semakin membaik.

tingkat pendidikan yang lain. Pada tahun 2014, angkatan kerja yang berpendidikan rendah mencapai sekitar 61,49 persen, menurun menjadi 57,84 persen di tahun 2015. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan menengah yaitu sekitar 28,53 persen (2014) meningkat menjadi 32,99 persen (2015). Kemudian angkatan kerja yang berpendidikan tinggi sekitar 9,98 persen (2014) menurun

7.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dalam kegiatan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja. Penduduk lainnya yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan atau lainnya.

Tabel 7.3.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 dan 2015

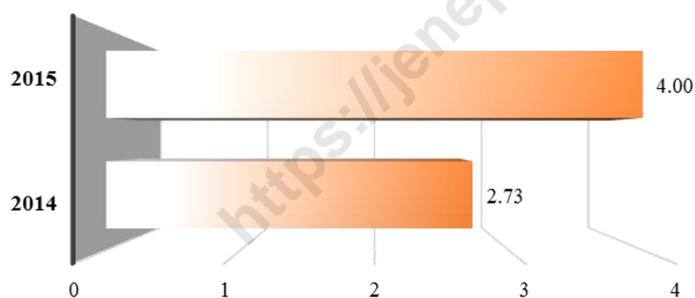
Kegiatan Utama	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Bekerja	60,1	58,35
Mencari Pekerjaan Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan Lainnya	1,68	2,43
	38,26	39,22
TPAK	61,74	60,78

Sumber: Sakernas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 mencapai 61,74 persen, sedangkan TPAK tahun 2015 yaitu sekitar 60,78 yang berarti bahwa pada setiap 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 61 di antaranya termasuk angkatan kerja.

7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 dan 2015



Pengangguran terbuka adalah: (i) mereka yang sedang mencari pekerjaan, (ii) mereka yang sedang mempersiapkan usaha baru, (iii) mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan (putus asa), dan atau (iv) mereka sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. Pada tahun 2014, TPT Kabupaten Jeneponto sekitar 2,73 persen, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi sekitar 4 persen. Dari angka tersebut terlihat bahwa angka pengangguran meningkat karena kurangnya kesempatan kerja yang ada di Jeneponto.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan satu ukuran yang dapat mencerminkan aspek-aspek pembangunan dan dianggap cukup baik untuk menggambarkan aspek sosial maupun ekonomi yang telah dicapai oleh suatu daerah. IPM 2016 menggunakan metode baru sesuai dengan metodologi UNDP. Komponen IPM yang mengalami perubahan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PNB per Kapita. Selain itu agregasi indeks IPM telah menggunakan rata-rata geometrik.
- b. IPM Kabupaten Jeneponto sedikit mengalami peningkatan selama kurun waktu 2015-2016 yaitu dari 61,61 pada tahun 2015 menjadi 61,81 pada tahun 2016.
- c. IPM Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 menduduki urutan terakhir dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Peringkat ini tidak jauh berbeda bila dibandingkan tahun 2015. Baik pada tahun 2015 maupun 2016, IPM Kabupaten Jeneponto berdasarkan kriteria UNDP digolongkan sebagai IPM menengah.
- d. Indeks Kesehatan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti selama periode 2015-2016 yaitu pada tahun 2015 sekitar 69,98 meningkat menjadi 70,11 pada tahun 2016.
- e. Indeks Pendidikan Kabupaten Jeneponto relatif mengalami peningkatan selama periode 2015-2016 yaitu dari 51,31 pada tahun 2015 naik menjadi 51,53 pada tahun 2016.
- f. Indeks Pengeluaran Kabupaten Jeneponto mengalami perubahan selama periode 2015-2016 yaitu dari 65,13 pada tahun 2015 meningkat menjadi 65,38 pada tahun 2016.

8.2. Implikasi Kebijakan

1. Usaha peningkatan kemampuan dasar sumber daya manusia dalam bidang kesehatan di antaranya melalui pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi terutama balita, dan peningkatan peran serta masyarakat.
 - a. Pemerataan pelayanan kesehatan di antaranya melalui:

- Penambahan sarana pelayanan kesehatan.
 - Penambahan tenaga medis dan paramedis.
 - Penyediaan obat-obatan yang harganya terjangkau oleh masyarakat.
- b. Peningkatan status gizi
- Pemberian kapsul zat gizi terutama bagi ibu hamil dan balita.
 - Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita lebih diintensifkan/diperluas.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat
- Melakukan intervensi kepemimpinan yang berwawasan kesehatan untuk semua.
 - Melakukan intervensi kesehatan pada setiap kelompok masyarakat sehingga muncul usaha kesehatan bersama masyarakat.
 - Memanfaatkan sumber dana yang ada pada masyarakat untuk membiayai kegiatan bidang kesehatan.

Dalam rangka mencapai sasaran 'Indonesia Sehat 2016' diperlukan program kesehatan yang terpadu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah perlu melakukan berbagai program baik yang sifatnya promotif, preventif, maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.

2. Usaha bidang pendidikan melalui:

- a. Peningkatan angka melek huruf dengan upaya pemberantasan buta aksara melalui kejar paket A yang ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok pembaca dan penyediaan perpustakaan keliling. Dengan demikian angka melek huruf di kabupaten ini yang cukup baik dapat mencapai posisi ideal (AMH = 100 persen) pada waktu yang akan datang.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Untuk anak usia sekolah yang sudah bekerja membantu perekonomian rumah tangga, hendaknya waktu bekerja diatur sedemikian rupa tanpa mengganggu waktu belajar.
- c. Persoalan pendidikan yang lain adalah penduduk putus sekolah, yang diduga sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu, apalagi setelah bangsa kita dilanda krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu

berupaya mengatasinya melalui berbagai program, baik program penyelamatan yang bersifat subsidi langsung maupun program pemulihan yang lebih ditujukan kepada penataan sistem pendidikan serta pemberdayaan keluarga dalam kaitannya dengan pendidikan anak.

- d. Selain pengembangan sistem pendidikan formal, maka kebijakan perlu pula ditujukan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pendidikan non formal. Kebijakan ini ditujukan untuk kelompok penduduk yang karena pertimbangan usia maupun alasan lainnya, tidak dapat ikut dalam sistem pendidikan formal. Dengan kebijakan pendidikan non formal ini maka diharapkan terjadi peningkatan kemampuan dasar di kalangan penduduk, terutama mereka yang berlatar belakang pendidikan formal rendah atau tidak ada sama sekali. Kemampuan tersebut mencakup membaca/menulis, pengetahuan umum, serta keterampilan-keterampilan yang dipandang perlu.
3. Usaha bidang ekonomi melalui:
 - a. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya serta pengembangan kapabilitas angkatan kerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi.
 - b. Peningkatan investasi daerah dengan membuka ruang dan iklim usaha yang sehat bagi dunia usaha dan jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di daerah.

Tabel Lampiran 1
Komponen Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 dan 2016

No.	Komponen	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	65,49	65,57
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,70	11,77
3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	5,64	5,65
4.	Purchasing Power Parity (PPP) (000 Rp)	8.489	8.559
5.	Indeks Kesehatan	69,98	70,11
6.	Indeks HLS	65,02	65,39
7.	Indeks RLS	37,61	37,67
8.	Indeks Pendidikan	51,31	51,53
9.	Indeks Pengeluaran	65,13	65,38
IPM		61,61	61,81

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel Lampiran 2
Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 (Ribu Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.448.731.953	1.245.329.180
A. Belanja Tidak Langsung	670.066.877	585.917.070
1. Belanja Pegawai	568.163.090	487.666.145
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Hibah	3.350.000	2.869.000
4. Belanja Bantuan Sosial	300.000	100.000
5. Belanja Bagi Hasil	1.820.044	0
6. Belanja Bantuan Keuangan	95.433.743	95.230.826
7. Belanja Tidak Terduga	1.000.000	51.099
B. BELANJA LANGSUNG	778.665.076	659.412.110

Sumber: Bagian Anggaran PEMDA Kab. Jeneponto

Tabel Lampiran 3
Angka Harapan Hidup dan Paritas Daya Beli
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2015 dan 2016

No.	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH)		Paritas Daya Beli (PPP) (juta Rp)	
		2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Selayar	67,70	67,76	7,793	8,123
2.	Bulukumba	66,73	66,84	9,777	10,040
3.	Bantaeng	69,77	69,84	10,467	10,596
4.	Jeneponto	65,49	65,57	8,489	8,559
5.	Takalar	66,20	66,29	9,423	9,759
6.	Gowa	69,88	69,92	8,578	8,717
7.	Sinjai	66,46	66,54	8,433	8,706
8.	Maros	68,55	68,58	9,468	9,758
9.	Pangkajene dan Kepulauan	65,67	65,77	10,517	10,670
10.	Barru	68,03	68,16	9,811	10,155
11.	Bone	66,01	66,12	7,930	8,275
12.	Soppeng	68,52	68,62	8,835	8,965
13.	Wajo	66,23	66,38	11,047	11,681
14.	Sidenreng Rappang	68,57	68,69	11,004	11,368
15.	Pinrang	68,43	68,55	10,791	10,899
16.	Enrekang	70,31	70,34	9,818	10,188
17.	Luwu	69,44	69,52	9,160	9,301
18.	Tana Toraja	72,41	72,48	6,273	6,509
19.	Luwu Utara	67,40	67,50	10,697	10,786
20.	Luwu Timur	69,64	69,71	11,926	11,960
21.	Toraja Utara	72,80	72,87	7,033	7,228
22.	Kota Makassar	71,47	71,49	15,669	16,013
23.	Kota Pare-Pare	70,59	70,64	12,817	12,966
24.	Kota Palopo	70,20	70,25	12,005	12,156
Sulawesi Selatan		69,80	69,82	9,992	10,281

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel Lampiran 4
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2015 dan 2016

No.	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
		2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Selayar	12,29	12,44	7,16	7,17
2.	Bulukumba	12,32	12,64	6,68	6,86
3.	Bantaeng	11,67	11,88	6,16	6,17
4.	Jeneponto	11,70	11,77	5,64	5,65
5.	Takalar	11,61	12,00	6,57	6,64
6.	Gowa	12,74	13,03	7,24	7,52
7.	Sinjai	12,34	12,83	7,05	7,06
8.	Maros	12,67	12,96	7,19	7,20
9.	Pangkajene dan Kepulauan	12,38	12,39	7,32	7,33
10.	Barru	13,53	13,54	7,60	7,61
11.	Bone	12,41	12,42	6,55	6,76
12.	Soppeng	11,81	12,20	7,05	7,06
13.	Wajo	13,07	13,08	6,37	6,38
14.	Sidenreng Rappang	12,88	12,89	7,32	7,33
15.	Pinrang	13,17	13,18	7,47	7,48
16.	Enrekang	13,30	13,65	8,05	8,06
17.	Luwu	12,88	13,27	7,74	7,75
18.	Tana Toraja	13,23	13,24	7,91	7,92
19.	Luwu Utara	12,11	12,33	7,38	7,39
20.	Luwu Timur	12,36	12,78	7,87	7,88
21.	Toraja Utara	12,95	13,33	7,71	7,72
22.	Kota Makassar	14,76	14,80	10,77	11,07
23.	Kota Pare-Pare	14,44	14,45	10,01	10,02
24.	Kota Palopo	15,02	15,03	10,25	10,26
Sulawesi Selatan		12,99	13,16	7,64	7,75

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel Lampiran 5
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2015 dan 2016

No.	Kabupaten/Kota	2015	Peringkat	2016	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Selayar	64,32	21	64,95	22
2.	Bulukumba	65,58	18	66,46	17
3.	Bantaeng	66,20	16	66,59	16
4.	Jeneponto	61,61	24	61,81	24
5.	Takalar	64,07	22	64,96	21
6.	Gowa	66,87	13	67,70	12
7.	Sinjai	64,48	20	65,36	20
8.	Maros	67,13	11	67,76	11
9.	Pangkajene dan Kepulauan	66,65	15	66,86	15
10.	Barru	68,64	8	69,07	8
11.	Bone	63,11	23	63,86	23
12.	Soppeng	65,33	19	65,95	19
13.	Wajo	66,90	12	67,52	13
14.	Sidenreng Rappang	69,00	7	69,39	7
15.	Pinrang	69,24	6	69,42	6
16.	Enrekang	70,03	5	70,79	5
17.	Luwu	68,11	9	68,71	9
18.	Tana Toraja	65,75	17	66,25	18
19.	Luwu Utara	67,44	10	67,81	10
20.	Luwu Timur	70,43	4	70,95	4
21.	Toraja Utara	66,76	14	67,49	14
22.	Kota Makassar	79,94	1	80,53	1
23.	Kota Pare-Pare	76,31	2	76,48	2
24.	Kota Palopo	76,27	3	76,45	3
Sulawesi Selatan		69,15		69,76	

Sumber: Badan Pusat Statistik

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JENEPONTO**
JL. PELITA NO.58 BONTOSUNGGU
TELP: (0419) 22256 ; FAX: (0419) 22256
EMAIL: bps7304@bps.go.id